

## **Pengendalian Sistem Ekologi, Sosial, dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kualitas Gaya Hidup (Lifestyle) Masyarakat di Perkotaan**

---

Tina Ratnawati

### **PENDAHULUAN**

Wilayah perkotaan memiliki permasalahan lingkungan yang terus bertambah seiring dengan dinamika pertumbuhan penduduknya. Masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan hidup di perkotaan, karena wilayah di perkotaan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, industri, dan perdagangan. Namun, masyarakat sering melanggar hukum-hukum ekologi dan lingkungan demi kebutuhan pembangunan dan keuntungan ekonomi ini. Perilaku ekonomi pada masyarakat berkisar pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) hal, berikut 1) kebutuhan *fisiologis* yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, 2) kebutuhan *psikologis* yang muncul berupa rasa aman, loyalitas, dan penghargaan. Perencanaan dan pembentukan perkotaan dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permasalahan lingkungan yang terjadi lebih dipengaruhi akibat perbuatan manusianya sendiri. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu kota yang layak huni, yaitu kota yang dapat menampung dan mengakomodasi semua kegiatan masyarakat kota dan juga aman bagi seluruh masyarakatnya (Timmer dan Seymorar, 2005).

Akhir-akhir ini peranan kota di dalam kegiatan pembangunan seringkali dipermasalahkan, kota dikatakan sudah terlalu besar, kota dikatakan sudah tidak manusiawi, banyak bagian kota yang dikategorikan miskin, kota mengalami pencemaran, pengelolaan sampah di perkotaan tidak baik, pertumbuhan yang tidak berimbang antara gedung-gedung pencakar langit dan permukiman, serta perimbangan yang kurang baik antara manusia dan teknologi (Hauser, 1985). Masyarakat perkotaan membutuhkan kota yang layak huni bagi mereka. Dengan memiliki kota yang layak huni, masyarakat akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang mengganggu kenyamanan mereka. Salah satu solusi yang digunakan untuk menciptakan suatu kota yang layak huni dan sehat adalah konsep kota hijau (*green city*).

Pembentukan kota hijau diharapkan dapat menyediakan ruang hijau sebagai paru-paru kota. Paru-paru kota diharapkan dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk mengurangi lingkungan hidup perkotaan yang semakin rusak dan tercemar karena alasan pembangunan dan keuntungan ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan ditandai dengan kemampuan mereka dalam mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan, lapangan kerja, serta ruang hijau. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Kemampuan untuk mempertahankan kualitas hidup merupakan tujuan yang ingin dimiliki oleh masyarakat kota terkait dengan pengembangan kota layak huni ini, karena konsep kota layak huni merupakan salah satu bentuk keterwakilan dari konsep kota yang berkelanjutan (Evans, 2002).

Kota hijau terbentuk karena adanya pengendalian terhadap sistem ekologi (antara lain mencakup suhu, erosi, dan banjir), sistem sosial (kerukunan warga, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit), dan sistem ekonomi (pekerjaan). Dari aspek ekologi kota dapat diartikan sebagai kumpulan penduduk yang dipisahkan karena latar belakang kemakmuran dan kebudayaan. Dari aspek sosial, kota dapat diteropong dari hubungan-hubungan sosial antar warganya. Hubungan sosial yang terjadi seringkali bersifat individual, sering terjadi hubungan yang timbul, karena kepentingan saja. Dari aspek ekonomi, kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, dan kegiatan pemerintahan, serta jasa-jasa pelayanan lainnya. Pengendalian terhadap ke tiga sistem ini banyak menghadapi tantangan dan kendala khususnya dari permasalahan sosial yang disebabkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan tidak hanya pada unsur sistem sosial, namun juga pada unsur-unsur sistem lainnya.

Tulisan ini akan membahas upaya pengendalian sistem ekologi, ekonomi, dan sosial di perkotaan agar tercipta lingkungan hidup perkotaan yang layak huni bagi warganya.

## **PENGENDALIAN SISTEM EKOLOGI**

Kota sebagai lingkungan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi manusia saja, melainkan juga bagi segala makhluk hidup lain seperti beragam jenis hewan dan tumbuhan, dan tentunya benda-benda fisik lainnya. Keterkaitan

dan timbal balik dari unsur- unsur ini merupakan satu kesatuan ekologi yang biasanya disebut sebagai ekosistem (Asy'ari, 1993). Manusia pada dasarnya berinteraksi sepanjang hidupnya dengan lingkungan, namun dengan perilakunya yang kurang pantas, manusia juga kurang menjaga lingkungan. Hubungan antara manusia dengan alam berlangsung sejalan dengan perkembangan peradaban manusia di muka bumi ini. Manusia sebagai makhluk yang dinamis, berinteraksi dengan alam dan selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki nasibnya dengan berpikir dan bekerja. Interaksi yang berlangsung secara terus menerus ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Timbulnya perubahan interaksi antara manusia dengan lingkungan umumnya disebabkan oleh pengaruh pertambahan penduduk (unsur sistem sosial) serta pengaruh unsur sistem ekonomi seperti ekonomi pasar, situasi politik, dan kebijakan pemerintah. Dari sisi ekologi, faktor penduduk dikategorikan sebagai faktor internal, sementara ekonomi pasar, situasi politik, dan kebijakan pemerintah adalah faktor eksternal. Perubahan ini juga terjadi karena secara fisik manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang lemah sehingga membutuhkan bantuan dan sangat tergantung kepada komponen ekosistem lainnya untuk menjalankan perikehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya (Zulkifli, 2014).

Penurunan kualitas lingkungan di perkotaan antara lain disebabkan oleh faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada ekosistem atau lingkungan secara dominan. Kerusakan bukanlah diakibatkan oleh ulah manusia, artinya manusia tidaklah memiliki peranan penting. Kerusakan yang timbul adalah kerusakan yang diakibatkan oleh alam itu sendiri seperti tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya. Faktor penyebab langsung adalah terkait dengan ulah manusia yang dengan terpaksa harus mengeksploitasi ekosistem atau lingkungan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan mencapai kesejahteraannya. Manusia dengan keserakahannya tidak dapat menjaga kelestarian lingkungan dengan baik atau perilaku kekurangsadarnya dalam menjaga lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara ilegal, membakar hutan untuk keperluan perkebunan (Departemen Agama RI, 2009).

Permasalahan dunia tentang kerusakan lingkungan berikut ekosistemnya dengan segala aspek yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, diantaranya meliputi perubahan cuaca, pemanasan global, ketidak seimbangan antara musim hujan dan kemarau, terjadi angin topan dimana-mana, permasalahan banjir yang dihadapi oleh kota-kota besar didunia, permasalahan sampah, penyakit yang dengan mudah tersebar luas, terutama di daerah tropis. Ditambah dengan perilaku antroposentrik, kerakusan, dan hedonis terhadap dunia yang dapat menjadikan alam secara keseluruhan mendekati kehancuran. Peranan manusia, yang sering disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai pemakmur bumi bukan hanya sebagai penguasa bumi. Dari sini urgensi pengembangan pelestarian lingkungan, akan sangat terkait dengan ketergantungan manusia pada alam, segala sesuatu diciptakan secara seimbang, segala yang berada di alam adalah untuk kepentingan manusia, alam adalah sebagai sumber rizki (Departemen Agama RI, 2009).

Untuk itu, diperlukan strategi bagi kehidupan berkelanjutan yang lebih baik. Salah satu strategi dikenal sebagai *caring for the earth* (Alikodra, 2012). Strategi ini bertujuan untuk membantu perbaikan kondisi masyarakat dunia termasuk masyarakat perkotaan yang meliputi dua kebutuhan. *Pertama*, memastikan komitmen dilaksanakannya etika baru untuk kehidupan berkelanjutan dan menerjemahkan prinsip-prinsipnya menjadi kenyataan. *Kedua*, mengintegrasikan konservasi dan pembangunan, di mana konservasi (upaya penegelolaan sumberdaya alam) adalah kegiatan untuk mempertahankan kapasitas bumi, dan pembangunan ditunjukkan agar manusia di mana saja mendapatkan kebahagiaan secara berkelanjutan, kesehatan dan terpenuhinya kecukupan hidup. Perbanyak ruang hijau, wawasan kesadaran akan gaya hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menjalankan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Implementasi dari strategi *caring for the earth* adalah pengembangan konsep kota ekologi yang saat ini sedang dibahas di berbagai daerah perkotaan. Kota ekologi dipersepsikan sebagai bentuk kota hijau yang mampu memiliki ruang hijau yang mampu memberikan udara yang baik bagi sebuah kota. Konsep ini mengandalkan paru-paru kota yang diharapkan mampu menjadi penetralisir bagi dampak buruk pencemaran perkotaan yang erat terkait dengan gaya hidup konsumtif dan boros penggunaan energi. Konsep kota ekologi memang dapat menjadi solusi tepat bagi

terciptanya sebuah kota yang sehat, karena secara potensial dapat mengendalikan sistem ekologi (suhu, erosi, dan banjir). Namun seiring waktu, konsep ini menghadapi tantangan dari berbagai permasalahan sosial yang sering kali disebabkan oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan semakin sempitnya lahan di daerah urban. Kekhawatiran utama dari laju pertumbuhan penduduk, selain menurunnya kualitas tempat hidup, juga akan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya alam (SDA) dengan pola konsumsi manusia. Kota yang secara ekologis dikatakan kota yang sehat, artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Pengertian yang lebih luas ialah adanya hubungan timbal balik antara kehidupan kota dengan lingkungannya. Secara mendasar kota bisa dipandang fungsinya seperti suatu ekosistem. Ekosistem kota memiliki keterkaitan sistem yang erat dengan ekosistem alami.

Kota ekologis di beberapa kota diwujudkan dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk mencapai 'kota hijau'. Program kota hijau merupakan program yang menyatakan perlunya kualitas hidup yang lebih baik serta kehidupan yang harmonis dengan lingkungannya bagi masyarakat kota. Program-program kota hijau diantaranya tidak hanya terbatas untuk mengupayakan penghijauan saja akan tetapi lebih luas untuk mengupayakan konversi energi yang dapat diperbaharui, membangun transportasi yang berkelanjutan, memperluas proses daur ulang, memberdayakan masyarakat, mendukung usaha kecil dan kerjasama sebagai tanggung jawab sosial, memugar tempat tinggal liar, memperluas partisipasi dalam perencanaan untuk keberlanjutan, menciptakan seni dan perayaan yang bersifat komunal.

Sejalan dengan konsep 'kota hijau' dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan ini dari sisi pengendalian ekologi, Kamal-Chaoui dan Robert (2009) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) hal yang harus diperhatikan dan dikelola pemerintah kota dalam mewujudkan 'kota hijau', yaitu 1) metabolisme lingkungan perkotaan, 2) pengelolaan limbah, 3) pengelolaan air, 4) kualitas udara, 5) pencemaran, dan 6) energi, perubahan iklim, serta keamanan lingkungan perkotaan. Menurut Sumner (2011) terdapat 8 (delapan) indikator kota berkelanjutan yang ditetapkan oleh Asian Green City Index, yaitu 1) energi dan CO<sub>2</sub>, 2) penggunaan lahan dan bangunan, 3) transportasi, 4) sampah, 5) air, 6) sanitasi, 7) kualitas udara, dan 8) *environmental governance*.

Dari paparan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa upaya pengendalian sistem ekologi untuk meningkatkan kualitas gaya hidup masyarakat perkotaan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya adalah metabolisme lingkungan perkotaan, pengelolaan limbah, dan air bersih sehat, kualitas udara, serta keamanan lingkungan perkotaan.

## **PENGENDALIAN SISTEM SOSIAL**

Karena kota merupakan lambang dari peradaban manusia, salah satu indikasi berkembangnya gaya hidup perkotaan adalah berkembangnya komponen sistem sosial, seperti kerukunan warga, tempat tinggal, sekolah, rumah sakit. Perkembangan ini menunjukkan terjadinya peningkatan pada kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan. Disisi lain, masyarakat perkotaan sekarang cenderung kurang bersosialisasi karena mereka sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Pola kerukunan warga sebagai salah satu bentuk interaksi antar anggota masyarakat sudah mulai bergeser.

Pola interaksi masyarakat pedesaan dengan prinsip kerukunan sudah bergeser pada masyarakat perkotaan. Pola interaksi masyarakat perkotaan lebih ke motif ekonomi, politik, pendidikan, dan kadang hierarki. Pola solidaritas sosial masyarakat pedesaan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, sedangkan masyarakat kota terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan sanitasi lingkungan seperti air bersih kurang diperhatikan oleh masyarakat perkotaan. Menurut penelitian WHO, sistem air perkotaan di negara-negara berkembang tidaklah diawasi sebagaimana mestinya guna mencegah kontaminasi biologis. Tak bisa dipungkiri bahwa risiko terjangkit penyakit emfisema dan bronchitis kronis akibat rokok dan polusi udara kerap dialami masyarakat di perkotaan, terutama karena udara di perkotaan sudah kurang sehat dan kurang baik untuk di hirup.

Bentuk pengendalian sistem sosial untuk meningkatkan kualitas gaya hidup perkotaan ini antara lain dapat dilakukan melalui perubahan perilaku masyarakat perkotaan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan lahan-lahan yang diperuntukkan bagi fungsi sosial dengan baik. Yang dimaksud dengan perubahan perilaku masyarakat disini adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap mental, dan kemampuan dalam mengendalikan lingkungan sosialnya.

## PENGENDALIAN SISTEM EKONOMI

Kota besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pemerintahan, sekaligus menjadi pusat industri dan perdagangan (Djunaedi, 2012). Dalam menetapkan kebutuhan pokok manusia terkait dengan adanya perilaku ekonomi, berkisar pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perbedaan pendapat para pakar ekonomi menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kebutuhan mendasar manusia terdiri atas dua hal yaitu: a) kebutuhan *fisiologis* berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal, serta b) kebutuhan *psikologis* berupa rasa aman, loyalitas, dan penghargaan.

Ciri kehidupan kota yang menggambarkan saat ini adalah sebagai berikut.

1. Adanya pelapisan sosial ekonomi misalnya perbedaan tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan.
2. Adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial diantara warganya.
3. Adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi, dan kondisi kehidupan.
4. Warga kota umumnya sangat menghargai waktu.
5. Cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomis.
6. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar.
7. Pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu, sedangkan sifat solidaritas, dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi.

Kota yang telah berkembang maju dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya mempunyai peranan yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut.

1. Sebagai pusat pemukiman penduduk.
2. Sebagai pusat kegiatan ekonomi.
3. Sebagai pusat kegiatan sosial budaya.
4. Sebagai pusat kegiatan politik dan administrasi pemerintah, serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan.

Ciri fisik dan kehidupan kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya meliputi hal sebagai berikut.

1. Tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan.

2. Tersedianya tempat-tempat untuk parkir.
3. Terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga.

Terkait dengan pengendalian sistem ekonomi, hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas gaya hidup masyarakat perkotaan, antara lain adalah upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia, melalui penyediaan pasar, pertokoan, sarana rekreasi, dan olah raga.

### **KUALITAS GAYA HIDUP (*LIFESTYLE*) MASYARAKAT PERKOTAAN**

Hidupnya suatu kota terjadi karena kota dapat memberikan pelayanan yang penting, artinya kota dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Evers, 1986). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka kota harus ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti kawasan permukiman, perdagangan, pemerintahan, industri, sarana kebudayaan, kesehatan, rekreasi, ruang hijau, dan yang lainnya. Hal ini harus disiapkan secara komprehensif.

Ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat kota yaitu:

1. Kehidupan keagamaan yang terjadi pada masyarakat kota cenderung berkurang, hal ini dikarenakan masyarakat kota lebih mengutamakan kehidupan duniawi.
2. Masyarakat kota pada umumnya mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain, dengan kata lain masyarakat kota lebih memilih kehidupan yang individualistik.
3. Masyarakat kota membagi pekerjaan dengan lebih tegas, pekerjaan, dan aktivitas warga kota mempengaruhi ruang lingkup pergaulan mereka. Contoh, pegawai negeri lebih banyak bergaul dengan rekannya sesama pegawai negeri dibandingkan bergaul dengan pedagang kaki lima atau pelajar.
4. Di perkotaan kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar dibanding di desa.
5. Pembagian kerja pada masyarakat kota sudah lebih meluas, karena sudah ada bermacam kegiatan industri.
6. Jalan pikiran masyarakat kota umumnya bersifat rasional, sehingga interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.



7. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi masyarakat kota.
8. Perubahan sosial terlihat jelas di kota, hal ini dikarenakan kota terbuka menerima pengaruh dari luar.
9. Banyak ditemukan kebudayaan yang beraneka ragam.

Keadaan atau kondisi masyarakat perkotaan yang harus ditingkatkan dengan mengendalikan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi adalah:

1. Ketersediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan, seperti hunian yang layak, penerangan/listrik, air bersih.
2. Ketersediaan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan.
3. Ketersediaan ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi.
4. Keamanan, bebas dari rasa takut.
5. Dukungan terhadap fungsi ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Sanitasi lingkungan yang baik.
7. Keindahan lingkungan fisik.

Selain itu, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan (Djonoputro, 2009).

Proses pembangunan kota yang berkelanjutan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan-kawasan di kota tersebut, proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat dan interaksi antara masyarakat dan lingkungannya. Evaluasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu cara adalah evaluasi berdasarkan kriteria pembangunan berkelanjutan. Gondokusumo (2011) menyebutkan kriteria pembangunan kota yang berkelanjutan sebagai 3 (tiga) PRO, yaitu pertama Pro keadilan sosial, artinya keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan kesetaraan gender. Kedua Pro ekonomi kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan. Ketiga Pro lingkungan berkelanjutan, artinya etika lingkungan *non antroposentris* menjadi pedoman hidup *stakeholder* di kota, sehingga

para *stakeholder* ini selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumber daya alam vital dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.

Pembangunan kota yang berkelanjutan mensyaratkan tidak hanya keberlanjutan sosial – ekonomi – budaya, namun juga keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan terkait dengan dampak polusi dan konsumen di perkotaan tergantung pada daya dukung lingkungan dan sumber daya alam seperti tanah, air dan energi. Sebagai penutup, perlu ada pemahaman bahwa kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah ancaman utama bagi pembangunan kota yang berkelanjutan (Bagio & Dahiya, 2004).

Untuk meningkatkan kualitas *lifestyle* masyarakat perkotaan pada dasarnya mengharuskan adanya integrasi peran dari tiga komponen pembangunan kota yang seringkali disebut sebagai pilar pembangunan kota, yaitu pertama pilar ekologi, dimana pilar ekologi ini adalah yang menjamin ekosistem kota dapat melakukan proses-proses ekologis esensialnya (seperti optimasi aliran energi dan siklus materi, mengameliiorasi iklim, mengendalikan pencemaran lingkungan, menyajikan habitat yang kondusif untuk berbagai jenis flora dan fauna yang sesuai dengan lingkungan kota, plasma nutfah, bebas banjir, indah, dan lainnya). Kedua pilar ekonomi yang memfasilitasi masyarakat perkotaan atau penghuninya untuk menjalani kehidupan yang produktif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ketiga pilar sosial-budaya yang memfasilitasi kepuasan dan kebebasan berekspresi secara berkeadilan dan bertanggung-jawab dari berbagai lapisan masyarakat yang bermartabat, membentuk masyarakat yang cinta lingkungan/cinta kota serta memediasi kenyamanan/keamanan hidup bersosial, dengan sistem tata kelola pengurusan yang baik. Pengelolaan yang optimal dari ketiga pilar pembangunan kota tersebut itulah yang akan mewujudkan ‘kota hijau’ yang diidam-idamkan yang dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal berkelanjutan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat perkotaan. Faktor kelembagaan dan inovasi teknologi sangat penting untuk menggulirkan keberlanjutan dari fungsi dan manfaat ekosistem kota hijau tersebut. Dalam hal ini, wujud pembangunan ‘kota hijau’ sebagai bentuk kota berkelanjutan bertujuan untuk *Security/safety*: masyarakat dapat menjalankan kegiatannya tanpa takut terhadap gangguan, baik gangguan buatan manusia maupun alami. *Comfortability*: menyediakan kesempatan bagi setiap elemen masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dalam

keadaan damai. *Productivity*: menyediakan infrastruktur yang efektif dan efisien untuk proses produksi dan distribusi dalam rangka meningkatkan nilai tambah. *Sustainability*: menyediakan kualitas lingkungan yang lebih baik tidak hanya bagi generasi saat ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Secara lebih rinci, kota berkelanjutan memiliki beberapa indikator dan dirangkum dalam 10 isu utama, yaitu Akses penduduk pada ruang terbuka hijau atau *green open space*. Lingkungan sehat yang diukur dari kualitas udaranya. Penggunaan sumberdaya energi, air, limbah, dan sampah yang efisien atau *green energi, green waste, dan green water*. Kualitas lingkungan binaan atau *green building*. Aksesibilitas yang baik terhadap transportasi umum, jalur sepeda, pejalan kaki atau *green transportation*. Ekonomi hijau atau *green economy*. Model partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota berkelanjutan atau *green community*. Keadilan sosial berkaitan dengan angka kemiskinan atau *social justice*. Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kenyamanan hidup. Serta berbagai aktivitas masyarakat di bidang sosial dan budaya.

## PENUTUP

Peningkatan kualitas gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat di perkotaan dapat dilakukan dengan mengendalikan sistem ekologi, sosial, dan ekonomi. Masyarakat perkotaan mendambakan untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman karena kota merupakan tempat untuk mereka tinggal, menetap, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kualitas kota yang baik adalah kota yang dapat membuat warga kota menjadi senang untuk melakukan kehidupannya di alam kota, tidak ada permasalahan sosial, budaya, lingkungan, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan harus dibutuhkan peran dari pemerintah kota sebagai pihak yang diberi mandat oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra. H. S. (2012). *Konservasi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Pendekatan Ecosophy Bagi Penyelamatan Bumi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asy'ari. S. I. (1993). *Sosiologi Kota Dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bagio. A. G., & Bharat. D. (2004). *Urban Environment and Infrastructure: Toward Livable Cities*. Wasington : World Bank.
- Departemen Agama RI. (2009). *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Cet I, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009. hal. 309, , hal. 7.
- Departemen Agama RI. (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Cet I. hal. 358. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Djonoputro, B. (2009). *Indonesia Most Livable City Index*. [www.slideshare.net//OswanMungkasa/iap-livable-city](http://www.slideshare.net/OswanMungkasa/iap-livable-city).
- Djunaedi, A. (2012). *Proses Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Evans, P. (2002). *Livable Cities The Politics of Urban Livelihood and Sustainability*. Berkeley: University of California Press.
- Evers. H. D. (1979). *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hauser, P. M. (1985). *Population And The Urban Future (Penduduk Dan Masa Depan Perkotaan)*, Terj. Masri Maris. Sri Pamoedjo Rahardjo. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Kamal-Chaoui L. & Robert A. (eds). (2009). *Competitive Cities and Climate Change*. Paris: OECD Publications.
- Sumner, J. (ed). (2011). *Asian Green City Index; Assessing the Environmental Performance of Asia's Major Cities*. Germany : Siemens AG, München.
- Zulkifli, A. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.

## **Peran Penyuluh dalam Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Perkotaan**

---

**Nurul Huda dan Sri Harijati**

### **PENDAHULUAN**

Kualitas hidup masyarakat perkotaan bukan hanya ditentukan oleh kualitas lingkungannya, tetapi juga asupan makanan yang berkualitas, antara lain kualitas sayuran yang dikonsumsi. Kualitas petani akan menentukan cara bercocok tanam sayuran yang baik, yang berujung pada kualitas sayuran yang dihasilkan. Kualitas petani dapat diperoleh melalui interaksinya dengan petani lain atau berinteraksi dengan penyuluh pertanian. Dengan demikian, aktivitas dan kualitas petani yang bercocok tanam di wilayah perkotaan, di samping memasok sayuran perkotaan, juga dapat berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Tulisan ini akan mengupas peran penyuluh dalam meningkatkan kemampuan petani, sehingga dapat menghasilkan sayuran yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam menjalankan hidup berkualitas.

### **PERTANIAN PERKOTAAN**

Indonesia sebagai negara agraris, memiliki lahan pertanian yang tidak hanya berada di wilayah pedesaan, tetapi juga ada di wilayah perkotaan. Namun demikian, di wilayah perkotaan, lahan pertanian yang tersedia menjadi terbatas karena lahan yang ada diperuntukkan terutama untuk gedung dan bangunan. Kondisi keterbatasan lahan pertanian ini mendorong tumbuhnya kegiatan pertanian perkotaan (*urban farming*) yang merupakan salah satu alternatif solusi untuk usaha pertanian di wilayah perkotaan.



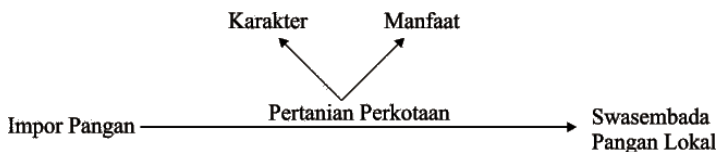
Sumber : Beritasatu.com (2015)

**Gambar 1. Pertanian Perkotaan**

Kawasan perkotaan umumnya cenderung dikembangkan bagi pemanfaatan lahan non pertanian. Walaupun demikian, pertanian perkotaan tetap menjadi salah satu pola pemanfaatan lahan yang akan mempengaruhi bentuk sekaligus keberlanjutan dari suatu kawasan perkotaan (Abrilianty dan Iwan, 2013).

Dari segi pengertiannya, pertanian perkotaan merupakan suatu kegiatan pertanian yang dilakukan di kawasan perkotaan yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan sempit perkotaan untuk kegiatan pertanian. Adanya pertanian perkotaan memungkinkan terjadinya penanaman, pemanenan dan pendistribusian makanan dari daerah perkotaan. Dengan demikian, pertanian perkotaan dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayah perkotaan, serta dapat meningkatkan pendapatan petani perkotaan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari pertanian perkotaan yaitu memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi pangan lokal.

Ardina dkk. (2014), dalam tulisannya menyebutkan bahwa salah satu manfaat pertanian perkotaan adalah dapat berperan dalam mengurangi impor pangan melalui produksi dan swasembada pangan lokal, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.



Sumber : Ardina dkk. (2014)

**Gambar 2. Peran Pertanian Perkotaan**

Pertanian perkotaan dapat menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah bagi ketahanan pangan di Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan daerah terutama di perkotaan yang saat ini mengalami urbanisasi. Wilayah perkotaan kini sudah bergeser pada alih guna lahan menjadi lahan terbangun. Hal ini menyebabkan keberadaan lahan pertanian produktif menjadi berkurang dan sempit. Kondisi lahan yang sempit bagi pertanian ini dapat disiasati dengan pertanian perkotaan.

Usaha pertanian perkotaan pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Petani merupakan pihak yang umumnya baru bergelut di bidang usaha pertanian.
2. Menjalankan model pertanian perkotaan yang berlahan sempit.
3. Memiliki peluang bekerjasama dengan berbagai organisasi.
4. Usaha pertanian yang dilaksanakan bersifat alami.
5. Pemusatan sumber daya dan pasar di lingkungan perkotaan.

Keberhasilan implementasi pertanian perkotaan harus memperhatikan ke lima karakteristik tersebut agar dapat dicarikan alternatif solusi pemecahan masalah dalam usaha taninya.



Sumber : Housing-estate.com (2015)

**Gambar 3.**  
**Usaha Pertanian Perkotaan yang Bersifat Alami**

Pertanian perkotaan relatif berskala kecil karena lahan yang digunakan terbatas. Untuk itu, beberapa model yang dapat diterapkan khusus untuk pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan atau ruang terbuka

adalah dengan membuat kebun-kebun komunitas, membuat kebun atap, dan membuat kebun vertikal.

Selain memanfaatkan lahan atau ruang terbuka, terdapat berbagai sistem pertanian perkotaan lain yang bisa dijadikan pilihan untuk berbagai usaha dalam bidang pertanian seperti usaha produksi benih/bibit, budidaya pertanian tanaman hias, sayuran, buah, ternak, dan ikan. Selain itu, pilihan juga dapat dalam bentuk usaha pengolahan produk-produk pertanian, pemasaran produk-produk pertanian, serta agrowidyawisata atau penyediaan jasa lainnya (BBP2TP, 2014).

Pertanian perkotaan dapat menjadi salah satu bentuk solusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan perkotaan. Pangan yang tidak mencukupi dapat berdampak pada meningkatnya ketergantungan kawasan perkotaan dengan wilayah lain. Kondisi ini mendorong pemerintah maupun masyarakat di kawasan perkotaan harus mulai mencoba memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Di sisi lain, sebagian kawasan perkotaan masih memiliki potensi pertanian yang apabila dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pangan warganya. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan aspek positif bagi keberlanjutan suatu kawasan perkotaan.

Potensi pertanian perkotaan antara lain memiliki potensi keberlanjutan yang cukup baik. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Multazam dan Hastu (2015). Penelitian tersebut mengkaji tentang kondisi keberlanjutan kegiatan pertanian di Kawasan Metropolitan Jakarta (KMJ) dengan menggunakan 37 indikator penilaian yang termasuk dalam enam aspek, yaitu aspek pelaku dan perilaku, lahan dan modal alam, infrastruktur, ekonomi, kelembagaan, dan dukungan masyarakat. Berdasarkan pemenuhan indikator keberlanjutan, dapat disimpulkan bahwa pertanian di KMJ cukup berlanjut karena memenuhi lebih dari separuh kondisi yang diharapkan.

Selanjutnya, studi tersebut merekomendasikan bahwa keberlanjutan kegiatan pertanian di KMJ dapat diperoleh dengan memperbaiki aspek-aspek keberlanjutan yang kurang, diantaranya aspek pelaku dan perilaku, lahan dan alam, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pertanian perkotaan dari aspek pelaku dan perilaku petani dalam menciptakan keberlanjutan pertanian perkotaan. Adanya kelompok tani di kawasan perkotaan juga menjadi hal penting, karena bantuan dan program yang diberikan saat ini targetnya adalah



kelompok tani. Dengan begitu, petani dapat memperoleh pengetahuan, pelatihan, serta bantuan dari pemerintah dan dapat berdiskusi untuk menanggulangi permasalahan yang sering muncul.

## PERMASALAHAN

Dari paparan diatas, dapat dikatakan bahwa pertanian perkotaan memiliki potensi dan keberlanjutan yang baik untuk dikembangkan. Namun, pertanian perkotaan juga memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia petani sebagai pelaku dalam usaha pertanian perkotaan.

Dalam pertanian perkotaan, umumnya petani melakukannya untuk kepentingan kehidupannya sendiri. Mereka juga umumnya bertani secara sendiri-sendiri sehingga kurang terjadi kerjasama antar petani. Mereka bertani di *on-farm* saja dan kurang kerjasama dengan subsistem lain. Selain itu, petani umumnya tidak berorientasi kebutuhan pasar, serta melaksanakan penanganan pascapanen yang minim dan tidak memadai. Strategi pemasaran yang mereka lakukan juga masih seadanya. Artinya petani masih memiliki pola perilaku berusaha tani yang sederhana dan tidak berorientasi keuntungan atau pasar. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi. Selain perilaku petani yang masih sederhana, juga dukungan faktor eksternal yang belum optimal. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian perkotaan sangat kecil dan kualitas hasil yang mereka peroleh juga belum memenuhi standar, sehingga tidak memberikan keuntungan besar bagi petani.

Usaha pertanian perkotaan dapat memberikan keuntungan apabila usaha pertanian dikelola dengan berorientasi pasar, serta ada kerjasama antar petani atau kelompok tani. Untuk itu, keberhasilan implementasi pertanian memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terkait, baik petani, masyarakat sekitar, pengusaha, institusi pendidikan, maupun pemerintah. Salah satu unsur pemerintah yang dapat mendukung usaha pertanian perkotaan adalah penyuluh. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan petugas dari Dinas Pertanian kota/kabupaten yang diperbantukan untuk memberikan pengarah, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian.

## **TUJUAN**

Berdasarkan permasalahan dalam pertanian perkotaan sebelumnya, maka tulisan ini akan membahasnya ditinjau dari segi ilmu penyuluhan, dalam hal ini pada masalah perilaku petani. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang sejauh mana peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani pada usaha pertanian perkotaan. Dengan demikian, petani perkotaan dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas sejalan dengan peningkatan kemampuan petani.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Penyuluh**

Penyuluh pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian karena sebagai agen perubahan, penyuluh merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan petani. Dalam hal ini, penyuluh merupakan pihak yang memberdayakan petani agar menjadi “mandiri” dalam melaksanakan usaha pertaniannya; yaitu mandiri dalam berpikir, bertindak, maupun mengendalikannya. Sebagai petugas pemerintah, penyuluh merupakan jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan peran yang sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan.

Pada masa yang lalu, penyuluhan dipandang sebagai alih teknologi dari peneliti ke petani. Kini peranan penyuluhan lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka dan menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan tersebut. Penyuluh berperan dalam menyampaikan informasi mengenai inovasi pertanian agar petani menjadi tahu, mau, dan mampu menjalankan usaha pertaniannya dengan baik dan benar. Dengan demikian, tujuan terpenting program penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku petani (van den Ban dan Hawkins, 1999).



Sumber : Penyuluh pertanian lapangan (2016)

**Gambar 4.**  
**Penyuluh Sedang Melakukan Penyuluhan Kepada Petani**

Peran penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan lebih mengarah pada perubahan berencana. Perubahan yang direncanakan mengimplikasikan pentingnya peran pendidik atau penyuluh dalam pengembangan program penyuluhan. Levin (Asngari, 2004) mengemukakan ada tiga peran utama penyuluh yaitu : (1) peleburan diri dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan berencana, dan (3) memantapkan hubungan sosial dengan masyarakat sasaran.

Dalam menjalankan perannya, penyuluh perlu melakukan pendekatan dengan lebih dahulu memahami kemampuan kelompok maupun perorangan agar materi yang disampaikan kepada petani dapat dicerna dengan baik oleh petani. Selanjutnya diadopsi dengan baik agar petani senantiasa meningkatkan efisiensi usaha pertaniannya, karena petani mendapatkan informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dibekali kemampuan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pengajar (Murdiyani, 2001). Hal ini terkait dengan peran penyuluh dalam mengubah perilaku petani agar tahu, mau, dan mampu menjalankan usaha tani dengan baik.

Berkaitan dengan perannya, Mosher dalam Mardikanto (1993) mengemukakan bahwa seorang penyuluh harus mampu melakukan multi peran yaitu : (1) sebagai guru, artinya seorang penyuluh harus terampil menyampaikan inovasi untuk mengubah perilaku sasarannya; (2) sebagai analisator, artinya seorang penyuluh harus memiliki keahlian untuk melakukan pengamatan terhadap keadaan, masalah, dan kebutuhan

masyarakat sasaran serta mampu memecahkan masalah petani; (3) sebagai konsultan, artinya seorang penyuluh harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk memilih alternatif perubahan yang paling tepat, yang secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomi menguntungkan dan dapat diterima oleh nilai-nilai budaya sosial setempat, dan (4) sebagai organisator, artinya seorang penyuluh harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat, mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat, mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan-perubahan, dapat memobilisasi sumberdaya, mengarahkan dan membina kegiatan maupun mengembangkan kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan.

Dengan perannya tersebut, para penyuluh diharapkan mampu memberdayakan petani agar mereka mampu, mau serta berdaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sendiri maupun masyarakat lainnya. Selain itu juga diharapkan para penyuluh mampu mengantisipasi kebutuhan pembangunan pertanian dan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab (Sumintareja, 2000).

Penyuluh merupakan mitra sejajar bagi petani yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian. Dalam menjalankan peran tersebut, penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Jabaran Tupoksi tersebut direvisi dan dituangkan dalam SK Menkowsbang PAN no 19 tahun 1999. Dalam SK tersebut dinyatakan bahwa penyuluh pertanian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

Menurut Padmanegara (Sumardjo, 1999), tugas ideal seorang penyuluh adalah: (1) menyebarkan informasi yang bermanfaat; (2) mengajarkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan sesuai bidang penyuluhannya; (3) memberikan rekomendasi yang lebih menguntungkan untuk perbaikan kehidupan sasaran penyuluhan; (4) mengusahakan berbagai fasilitas usaha yang lebih menggairahkan sasaran penyuluhan, dan (5) menimbulkan keswadayaan dan keswakartaan.

Dari paparan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam pertanian perkotaan, penyuluh dapat berperan dalam membantu petani untuk meningkatkan pengetahuan, sikap mental, dan keterampilannya dalam usaha pertanian perkotaan sehingga petani memiliki kompetensi yang lebih baik.

### Pemberdayaan Masyarakat

Pembahasan mengenai penyuluhan, maka tidak akan terlepas dari kata pemberdayaan, karena pemberdayaan merupakan tujuan dari penyuluhan itu sendiri. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Slamet (2003), bahwa “pemberdayaan yaitu membuat masyarakat (dalam konteks ini petani) mampu membangun dirinya sendiri atau memperbaiki kehidupannya sendiri” adalah merupakan tujuan penyuluhan. Dalam hal ini yang dimaksud “mampu” adalah sama dengan berdaya. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, karena didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik sekaligus.

Penyuluhan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, serta membangun masyarakat madani. Penyuluhan adalah untuk menghasilkan perubahan perilaku dan tindakan yang menguntungkan. Melalui proses pemberdayaan, kelompok masyarakat bawah diharapkan dapat terangkat menjadi kelompok masyarakat menengah dan atas. Hal tersebut dapat terjadi apabila mereka diberi kesempatan serta fasilitas dan bantuan oleh pihak yang terkait.



Sumber: Pemberdayaan masyarakat (2016)

**Gambar 5.**  
**Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan tersebut. Sebagai contoh, dalam pertanian perkotaan penyuluh dapat membantu petani untuk membentuk kelompok tani agar dapat saling belajar dan berdiskusi tentang usaha pertanian mereka. Disamping itu, penyuluh juga dapat membantu petani untuk mengakses informasi pasar agar dapat memasarkan produk pertanian mereka. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat petani dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan (Sulistiyani, 2004).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikitnya empat unsur pokok, yaitu:

1. Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas.
2. Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.
3. Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatasmakan rakyat.
4. Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja-sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Dari paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan dari kegiatan penyuluhan. Untuk itu, dalam kaitannya dengan usaha pertanian perkotaan, penyuluh berperan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi tahu, mau, dan mampu menjalankan usaha pertanian mereka dengan baik, sehingga menjadi petani yang mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

## **PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI DALAM PERTANIAN PERKOTAAN**

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan adalah dengan menggunakan kelompok tani. Dengan kelompok tani, proses penyuluhan akan berjalan lebih efisien dan efektif. Hal ini karena melalui kelompok, petani dapat saling berinteraksi dan berdiskusi untuk saling belajar satu sama lainnya.

Petani adalah warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang. Kelompok merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengadakan interaksi, memiliki tujuan atau *goals*, memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota yang mencakup peran, norma, dan hubungan antar anggota, serta kelompok, dan merupakan satu kesatuan (Hariadi, 2011). Dengan demikian, kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Keberadaan kelompok tani berfungsi sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal dan mendukung pembangunan pertanian (BP4K Mesuji, 2015).

Kelompok tani dengan kontak taninya (sebelumnya dikenal dengan istilah ketua kelompok tani) merupakan kelembagaan sosial yang pokok dalam sistem penyuluhan pertanian. Artinya, kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk saling berinteraksi tentang usaha pertanian yang mereka jalankan, dan juga merupakan tempat bernaung dalam

aktivitas penyuluhan pertanian. Kelompok tani sebagai suatu unit belajar merupakan wadah/tempat dilakukannya pelatihan atau penyuluhan (BP4K Mesuji, 2015).

Beberapa keuntungan dari pembentukan kelompok tani antara lain diungkapkan oleh Torres dalam Mardikanto (1993) sebagai berikut:

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinaanya kepemimpinan kelompok.
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerjasama antar petani.
3. Semakin cepatnya proses perembesan (difusi) penerapan inovasi (teknologi) baru.
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian pinjaman petani
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya.
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

Keberadaan kelompok tani menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi pada era sekarang ini. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi salah satu tantangan dalam upaya revitalisasi kelompok tani. Tidak sedikit daerah yang dalam pelaksanaan otonominya cenderung mengabaikan sektor pertanian karena dianggap kurang memberikan sumbangan pendapatan daerah yang besar secara cepat. Hal tersebut tentunya berdampak pada eksistensi lembaga pertanian khususnya kelompok tani.

Kelompok tani merupakan hal penting dalam proses penyampaian informasi dan teknologi baru kepada petani. Untuk itu perlu diketahui keefektifan kelompok tani sebagai media penyuluhan dalam penyampaian inovasi. Metode penyuluhan kelompok lebih menguntungkan daripada melalui media massa karena akan terjadi umpan balik yang dapat meminimalkan salah pengertian antara penyuluh dan petani dalam penyampaian informasi. Dalam metode ini interaksi yang timbul antara petani dan penyuluh akan lebih intensif. Petani diajak dan dibimbing secara berkelompok untuk melaksanakan kegiatan yang lebih produktif atas dasar kerjasama.





Sumber : Prayoga (2015)

**Gambar 6. Kelompok Tani**

Dalam skala yang lebih luas, kelompok tani dapat membentuk Gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sesuai Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani ada beberapa tujuan dari Gapoktan yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui pendidikan pelatihan dan studi banding sesuai kemampuan keuangan Gapoktan.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa kecuali yang terlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai anggota, secara materil maupun non materil sesuai dengan kontribusi/andil/masukan yang diberikan kepada pengembangan Organisasi Gapoktan.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha dibidang pertanian dan jasa yang berbasis pada bidang pertanian.
4. Dalam membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang jelas dan harus berpedoman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam kaitannya dengan pertanian perkotaan, petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat juga membentuk gabungan kelompok tani agar mereka memiliki wadah yang lebih luas.

Ditinjau dari manfaatnya, Gapoktan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut (Ayuningtyas, 2011):

1. Memudahkan para penyuluh pertanian melakukan pembinaan dalam memfasilitasi para petani dalam mengembangkan usahanya.
2. Memudahkan para pengambil kebijakan melaksanakan program-program yang akan dikembangkan.
3. Memudahkan penyuluh pertanian melakukan pemberdayaan terhadap petani.

Organisasi petani ini umumnya dibentuk untuk mempermudah anggota-anggotanya mencapai sebagian apa yang dibutuhkan dan/atau diinginkan. Dengan kesadaran semacam itu setiap anggota menginginkan dan akan berusaha agar kelompoknya dapat benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya, dengan meningkatkan mutu interaksi/kerjasamanya dalam memanfaatkan segala potensi yang ada pada anggota dan lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok.

Dari paparan tentang kelompok tani tersebut dapat dikatakan bahwa pembentukan kelompok tani dalam pertanian perkotaan merupakan sarana atau wadah bagi para petani. Dengan adanya organisasi ini mereka dapat saling belajar, berdiskusi, dan bertukar informasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pertanian mereka. Lebih jauh, melalui wadah kelompok tani, petani perkotaan akan meningkat kemampuan dalam menghasilkan sayuran berkualitas untuk mendukung gaya hidup masyarakat kota yang lebih sehat.

## **KESIMPULAN**

Pertanian perkotaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Mengingat potensi pertanian perkotaan yang baik, maka implementasi dan pengembangannya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak terkait. Penyuluh dapat berperan aktif dalam memberdayakan petani pada usaha pertanian perkotaan.

Melalui upaya pemberdayaan yang dilakukan penyuluh, antara lain pembentukan kelompok tani, maka petani akan mendapatkan proses

pembelajaran melalui kelompoknya. Melalui kelompok tani, diharapkan petani perkotaan memiliki pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan tentang usaha pertanian perkotaan, sehingga petani menjadi tahu, mau, dan mampu melaksanakan usaha pertanian perkotaan dengan baik. Melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, petani akan mandiri dalam melaksanakan usaha pertanian perkotaan, khususnya menghasilkan sayuran berkualitas.

Jika sudah mampu mandiri, selanjutnya petani akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, yang akhirnya menjadi bagian dari masyarakat yang mandiri. Dalam kaitannya dengan pertanian perkotaan, yaitu dari aspek makanan yang sehat, maka produk pertanian perkotaan berkualitas yang mereka hasilkan akan mendukung gaya hidup masyarakat perkotaan menjadi lebih sehat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abrilianty, O.N., & Iwan, K. (2013). *Jurnal perencanaan wilayah dan kota BSAPPK*, 2 (1), 89-99.
- Ardina P. R., Gumilang, R.V., & Imania, R.R. (2014). *Pertanian perkotaan sebagai salah satu alternative solusi ketahanan pangan*. Diunduh dari <https://ardinaputrirahutama.wordpress.com/2014/04/04/pertanian-perkotaan-sebagai-salah-satu-alternatif-solusi-ketahanan-pangan-ardina-putri-rahtama-viny-ratna-gumilang-rifa-rafika-imania/>.
- Asngari, P.S. (2004). *Peranan agen pembaharuan/penyuluh dalam usaha memberdayakan (empowerment) sumber daya manusia pengelola agribisnis*. Orasi Ilmiah. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, tanggal 15 September 2001. Bogor.
- Ayuningtyas, N.Y. (2012). *Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen melalui program Gapoktan (gabungan kelompok tani) di Kecamatan Moyudan*. Diunduh dari <http://nadrayunia.blogspot.co.id/2012/06/pemberdayaan-masyarakat-petani-dalam.html>.
- Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). (2014, 14 Maret ). *Model pertanian perkotaan*. Diunduh dari <http://litbang.pertanian.go.id/berita/1680/>.
- Berita satu.com (2015, 07 April). *Pertanian perkotaan segera diterapkan di Jakarta*. Diunduh dari <http://www.beritasatu.com/megapolitan/263421-pertanian-perkotaan-segera-diterapkan-di-jakarta.html> tanggal 07 April 2015.
- BP4K Mesuji (2015, 23 Oktober). *Peranan penting kelompok tani dalam pembangunan pertanian*. Diunduh dari <http://bp4kmesuji.net/peranan-penting-kelompok-tani-dalam-pembangunan-pertanian/>.
- Hariadi, S. S. (2011). *Dinamika kelompok*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

- Housing-estate.com (2015, 13 Juli). *Jakarta kembangkan pertanian perkotaan*. Diunduh dari <http://www.housing-estate.com/read/2015/07/13/jakarta-kembangkan-pertanian-perkotaan/>.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Multazam, A., & Hastu P. (2013). Keberlanjutan pertanian perkotaan di kawasan metropolitan Jakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ASAPPK*, 2 (2), 265-275.
- Murdiyani. (2001). *Studi kinerja penyuluh pertanian lapangan menurut petani padi sawah di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPT) Suluh Manuntung Lempake Kota Samarinda*. Skripsi. Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- Pemberdayaan Masyarakat. (2016). Diunduh dari <http://www.slideshare.net/tamabakungan/pemberdayaan-masyarakat-8524017>.
- Penyuluh pertanian lapangan. (2016). Diunduh dari [http://www.wikiwand.com/id/Penyuluh\\_Pertanian\\_Lapangan](http://www.wikiwand.com/id/Penyuluh_Pertanian_Lapangan).
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). (2007). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani*. Diunduh dari <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-273-07.pdf>.
- Prayoga, G. (2015). *Pemberdayaan dan proses penyadaran*. Diunduh dari [http://www.kompasiana.com/gie.lank18/pemberdayaan-dan-proses-penyadaran\\_550deaeaa33311bb2dba7d7e](http://www.kompasiana.com/gie.lank18/pemberdayaan-dan-proses-penyadaran_550deaeaa33311bb2dba7d7e).
- Slamet, M. (2003). *Pemberdayaan masyarakat dalam membentuk pola perilaku manusia pembangunan*. Editor: Yustina, I dan A Sudrajat. Penerbit IPB Press.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

## 222 Peran MST dalam Mendukung *Urban Lifestyle* yang Berkualitas

Sumardjo (1999). *Transformasi model penyuluhan pertanian menuju pengembangan kemandirian petani. Disertasi Doktor*. Bogor: Program Pascasarjana IPB.

Sumintareja. (2000). *Penyuluhan pertanian*. Jakarta: Departemen Pertanian.

van den Ban, A.W. & Hawkins, H.S. (1999). *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.